

**ANALISIS PRO-POOR GROWTH  
KABUPATEN PEKALONGAN: PROFIL DAN DEKOMPOSISI  
KEMISKINAN 2015-2019**

Yoyok Cahyo Nugroho<sup>1</sup>, Hendrawan Toni Taruno<sup>2</sup>  
BPS Kabupaten Demak<sup>1</sup>, BPS Provinsi Jawa Tengah<sup>2</sup>  
*cahyomecdev@gmail.com<sup>1</sup>, tonitaruno@gmail.com<sup>2</sup>*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan mengkaji (analisis) pertumbuhan pro-poor di Kabupaten Pekalongan periode 2015-2019. Secara lebih spesifik, studi ini dilakukan untuk mengetahui profil kemiskinan, pengaruh pertumbuhan dan distribusi terhadap perubahan kemiskinan, dan derajat pertumbuhan pro-poor di Kabupaten Pekalongan selama periode 2015-2019. Penelitian ini menerapkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) di Kabupaten Pekalongan tahun 2015-2019. Dimensi pendapatan dalam penelitian ini menggunakan data konsumsi (pengeluaran) rumah tangga sebagai pendekatan pendapatan. Dengan menggunakan analisis dekomposisi kemiskinan Shapley dan Poverty Equivalent Growth Rate (PEGR), studi ini menyarankan beberapa temuan. Pertama, selama periode 2015-2019, angka kemiskinan di Kabupaten Pekalongan mengalami penurunan yang juga diikuti dengan penurunan kesenjangan kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan. Kedua, sebagian besar penduduk miskin didominasi oleh kelompok usia non produktif, yaitu anak usia sekolah dan lansia. Ketiga, penurunan angka kemiskinan tidak dapat maksimal karena penurunan angka kemiskinan akibat pengaruh pertumbuhan terhambat oleh efek ketimpangan antar penduduk. Keempat, pertumbuhan selama periode 2015-2019 masih menetes ke bawah. Artinya, manfaat pertumbuhan ekonomi yang dirasakan oleh penduduk miskin secara proporsional lebih kecil dibandingkan dengan manfaat bagi yang tidak miskin.

**Kata Kunci:** Pro-poor growth, Poverty Equivalent Growth Rate (PEGR), Dekomposisi Shapley, Kemiskinan, Kabupaten Pekalongan.

**Abstract**

*This study aims to examine a pro-poor growth analysis in Pekalongan Regency in the 2015-2019 period. More specifically, this study was conducted to determine the poverty profile, the effects of growth and distribution on poverty changes, and the degree of pro-poor growth in Pekalongan Regency during the 2015-2019 period. This study applied the National Socio-Economic Survey (Susenas) data in the Pekalongan Regency in 2015-2019. The income dimension in this study uses household consumption (expenditure) data as an income approach. Using the Shapley poverty decomposition analysis and the Poverty Equivalent Growth Rate (PEGR), this study suggests several findings. First, during the 2015-2019 period, the poverty rate in Pekalongan Regency experienced a decline which was also followed by a decrease in the poverty gap and poverty severity index. Second, most of the poor are dominated by non-productive age groups, namely school-age children and the elderly. Third, the reduction in the poverty rate cannot be maximized because the reduction in poverty due to the effects of growth is hampered by the effect of inequality among the population. Fourth, growth during the 2015-2019 period was still trickle down. This means that the benefits of economic growth felt by the poor are proportionately less than the benefits to the non-poor.*

**Keywords:** Pro-poor growth, Poverty Equivalent Growth Rate (PEGR), Shapley Decomposition, Poverty, Pekalongan Regency

## A. PENDAHULUAN

Seiring berjalannya waktu, gagasan pembangunan yang berorientasi pertumbuhan, perlahan mulai bergeser. Paradigma pembangunan modern mulai berganti dengan model pembangunan yang inklusif. Proses pembangunan tidak lagi menitikberatkan pada pencapaian pertumbuhan ekonomi sebagai tujuan akhir, melainkan harus berdampak pada pengurangan tingkat kemiskinan, pengurangan ketimpangan pendapatan, serta mampu mengurangi tingkat pengangguran (Widodo, 2006:4). Gagasan ini mendorong minat pembuat kebijakan pada konsep “*pro-poor growth*”, terutama dalam upaya mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SGDs). Konsep *pro-poor growth* didasarkan pada gagasan bahwa pertumbuhan ekonomi seharusnya bermanfaat bagi semua pihak dalam masyarakat (Deutsch dan Silber, 2011: 1). Konsep *pro-poor growth* berkaitan dengan hubungan tiga elemen: kemiskinan, pertumbuhan dan ketimpangan (Kakwani dan Son, 2006: 2) yang digambarkan dalam bentuk “*Poverty-Growth-Inequality Triangle*” (Bourguignon, 2004: 5). Perubahan kemiskinan merupakan fungsi dari pertumbuhan, distribusi dan perubahan distribusi dengan asumsi distribusi

pendapatan per kapita mengikuti distribusi log normal.

Lopez (2011: 4-5) merangkum setidaknya ada dua definisi umum tentang *pro-poor growth*. Definisi kelompok pertama dikemukakan oleh White dan Anderson (2000) pertumbuhan disebut *pro-poor* jika tingkat pertumbuhan pendapatan kaum miskin lebih besar dari rata-rata tingkat pertumbuhan yang terjadi, sehingga ketimpangan relatif akan turun seiring dengan adanya pertumbuhan yang *pro-poor*. Definisi kelompok kedua dikemukakan oleh Ravallion dan Chen (2003) pertumbuhan adalah *pro-poor* jika menurunkan tingkat kemiskinan. Selama terjadi penurunan kemiskinan, pertumbuhan tetap disebut *pro-poor* meskipun faktanya kaum miskin hanya mendapatkan sebagian kecil dari manfaat pertumbuhan secara proporsional (Kakwani dan Son, 2006: 3).

Di Indonesia, kajian *pro-poor growth* pernah dilakukan oleh La ksani (2010) dan Pafrida (2010). Dengan menggunakan model persamaan regresi simultan yang dikembangkan oleh Wodon (1999), mereka berkesimpulan bahwa pertumbuhan secara signifikan telah mempengaruhi pengurangan kemiskinan, akan tetapi nilai elastisitas kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi tergolong rendah.

Studi *pro-poor growth* dengan metode *Poverty Equivalent Growth Rate* (PEGR) dilakukan oleh Suparno (2010) dan Mar'atis (2011) menggunakan data Susenas Modul Konsumsi. Suparno berkesimpulan bahwa pertumbuhan ekonomi di level nasional selama periode 2002-2005 diyakini belum *pro-poor*, sedangkan pertumbuhan yang bersifat *pro-poor growth* pada periode 2005-2008 hanya terjadi di daerah perkotaan dan sektor industri. Pada level provinsi, Mar'atis (2011) berhasil menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi pada akhir periode 2008- 2009 telah bersifat *pro-poor growth*, efek pertumbuhan dan efek distribusi secara bersama-sama berhasil menurunkan kemiskinan.

Studi ini bertujuan melakukan analisis *pro-poor growth* di Kabupaten Pekalongan dalam periode 2015-2019. Selama periode 2015-2019, bahwa tingkat kemiskinan telah dapat ditekan menjadi 9,71 persen pada tahun 2019. Masih ada sekitar 2,61 persen penduduk miskin yang harus diantarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan agar target RPJMD sebesar 7,10 persen pada tahun 2021 tercapai. Selain jauh dari target RPJMD, laju penurunan tingkat kemiskinan per tahun di Kabupaten Pekalongan (0,74 persen) juga lebih lambat dibandingkan laju penurunan kemiskinan Provinsi Jawa Tengah (0,88 persen).

Akibatnya, target penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Pekalongan pada tahun 2021 diperkirakan hanya akan menyentuh angka 8,23 persen. Ini artinya, target penurunan tingkat kemiskinan sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD, berpotensi tidak dapat tercapai.

Fakta masih jauhnya capaian kemiskinan dari target RPJMD serta lambatnya laju penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Pekalongan di atas menyisakan pertanyaan mendasar; seberapa besar sebenarnya manfaat pertumbuhan ekonomi bagi rakyat miskin? Secara lebih detail, seberapa besar efek pertumbuhan dan efek distribusi pendapatan berpengaruh terhadap perubahan tingkat kemiskinan di Kabupaten Pekalongan selama 2015-2019? Kemudian, bagaimana tipe pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pekalongan pada periode 2015-2019? Untuk menjawab kbeberapa pertanyaan ini, maka analisis *pro-poor growth* menjadi penting dilakukan. Selain untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang dinamika kemiskinan yang terjadi, studi ini dapat menjadi salah satu dasar penyusunan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pekalongan.

## **B. METODE PENELITIAN**

Studi *pro-poor growth* ini dilakukan dengan menggunakan metode Dekomposisi

Kemiskinan *Shapley dan Metoda Poverty Equivalent Growth Rate* (PEGR). Data utama adalah data Susenas Kabupaten Pekalongan pada periode 2015-2019, dengan total sampel sebanyak 15.287 jiwa. Dimensi *income* menggunakan data konsumsi (pengeluaran) per kapita sebagai pendekatan penghitungan pendapatan. Penghitungan dekomposisi kemiskinan *Shapley* dan PEGR menggunakan software STATA.11 dan paket program “*Distributive Analysis Stata Package*” (DASP) versi 2.2. Sedangkan analisis karakteristik kemiskinan beserta ketimpangan dan distribusi pendapatan digunakan software ADePT versi 6 yang dibuat oleh para peneliti Bank Dunia.

Penghitungan dekomposisi *Shapley* dan PEGR mensyaratkan adanya satu garis kemiskinan yang konstan sehingga didapat perbandingan pola distribusi di awal dan di akhir periode serta perbandingan antarperiode yang merupakan perubahan riil tanpa dipengaruhi oleh faktor perubahan

harga. Oleh karena itu, variabel pengeluaran per kapita yang digunakan perlu disesuaikan terlebih dahulu dengan cara di-*deflate* dengan proporsi antara garis kemiskinan pada tahun yang bersangkutan. Metoda penyesuaian ini merujuk pada penelitian Araar dan Duclos (2012: 84). Garis kemiskinan yang dijadikan baseline dalam penghitungan dekomposisi *Shapley* dan PEGR dalam penelitian ini adalah garis kemiskinan Kabupaten Pekalongan tahun 2015 yaitu sebesar Rp. 317.796,-.

### Dekomposisi Kemiskinan Shapley

Model dekomposisi *Shapley* yang digunakan mengacu model dekomposisi yang dikembangkan Shorrocks (1999). Model ini mendekomposisi perubahan kemiskinan antar periode secara penuh ke dalam efek redistribusi tanpa mengandung unsur residual.

Model dekomposisi kemiskinan *Shapley* dirumuskan dalam bentuk normalisasi FGT (*Foster- Greer-Thorbecke*) dapat dituliskan sebagai berikut.

$$\Delta P = P_2(z, \alpha) - P_1(z, \alpha)$$

$$\Delta P = \frac{1}{2} \left[ \left( P_1\left(\frac{z\mu_1}{\mu_2}, \alpha\right) - P_1(z, \alpha) \right) + \left( P_2(z, \alpha) - P_1\left(\frac{z\mu_2}{\mu_1}, \alpha\right) \right) \right] + \frac{1}{2} \left[ \left( P_2\left(\frac{z\mu_2}{\mu_1}, \alpha\right) - P_1(z, \alpha) \right) + \left( P_2(z, \alpha) - P_1\left(\frac{z\mu_2}{\mu_1}, \alpha\right) \right) \right]$$

$\Delta P$  = perubahan kemiskinan

$P_1(z, \alpha)$  = bentuk normalisasi ukuran kemiskinan FGT pada awal periode

$P_2(z, \alpha)$  = bentuk normalisasi ukuran kemiskinan FGT pada akhir periode

$P_1\left(\frac{z\mu_t}{\mu_s}, \alpha\right)$  = bentuk normalisasi ukuran kemiskinan FGT bila terjadi perubahan rata-rata pendapatan dari periode ke- $t$  terhadap periode ke- $s$  untuk  $t \neq s$ , dan  $t, s = 1, 2$

### **Poverty Equivalent Growth Rate**

Misalkan  $x$  adalah variabel acak pendapatan (pengeluaran) individu dengan fungsi distribusi  $f(x)$ . sedangkan  $z$  adalah garis kemiskinan, maka tingkat kemiskinan dapat dituliskan dalam bentuk:

$$\theta = \int_0^z P(z, x) f(x) dx \quad (3.3)$$

Ukuran kemiskinan  $\theta$  pada persamaan (3.3) sangat bergantung pada garis kemiskinan  $z$  dan vektor dari distribusi pendapatan  $\sim_x$ , sehingga  $\theta = \theta(z, \tilde{x})$  (3.4) merupakan distribusi pendapatan (pengeluaran riil, yang telah disesuaikan

perubahan harganya) pada tahun awal dan tahun akhir periode adalah  $\sim_{x_1}$

$$\hat{\eta} = \frac{1}{2} [\ln(\theta(z, \mu_2 \tilde{x}_1 / \mu_1)) - \ln(\theta(z, \tilde{x}_1)) + \ln(\theta(z, \tilde{x}_2)) - \ln(\theta(z, \mu_1 \tilde{x}_2 / \mu_2))] / \hat{\gamma} \quad (3.9)$$

$$\hat{\zeta} = \frac{1}{2} [\ln(\theta(z, \mu_1 \tilde{x}_2 / \mu_2)) - \ln(\theta(z, \tilde{x}_1)) + \ln(\theta(z, \tilde{x}_2)) - \ln(\theta(z, \mu_2 \tilde{x}_1 / \mu_1))] / \hat{\gamma} \quad (3.10)$$

dan  $\sim_{x_2}$  dengan rata-rata pendapatan  $\mu_1$  dan  $\mu_2$ , maka estimasi elastisitas pertumbuhan terhadap kemiskinan (elastisitas total kemiskinan) bisa didapatkan dengan rumus:

$$\hat{\gamma} = \frac{\ln[\theta(z, \tilde{x}_2)] - \ln[\theta(z, \tilde{x}_1)]}{\hat{\gamma}} \quad (3.5)$$

di mana  $\hat{\gamma}$  merupakan estimasi dari tingkat pertumbuhan rata-rata pendapatan (pertumbuhan aktual) yang dirumuskan

$$\hat{\gamma} = \ln(\mu_2) - \ln(\mu_1) \quad (3.6)$$

Sehingga estimasi dari PEGR dirumuskan sebagai

$$\hat{\gamma}^* = (\hat{\delta} / \hat{\eta}) \hat{\gamma} \quad (3.7)$$

di mana  $\hat{\eta}$  merupakan estimasi dari elastisitas pertumbuhan netral relatif terhadap kemiskinan (elastisitas murni pertumbuhan terhadap kemiskinan), sehingga:

$$\hat{\delta} = \hat{\eta} + \hat{\zeta} \quad (3.8)$$

di mana  $\hat{\zeta}$  merupakan estimasi dari efek ketimpangan dalam pengurangan kemiskinan. Metodologi dekomposisi kemiskinan dari Kakwani (2000) digunakan untuk menghitung  $\hat{\eta}$  dan  $\hat{\zeta}$  dengan formula sebagai berikut:

Secara relatif, pada saat pertumbuhan positif,  $\gamma > 0$ , jika nilai PEGR lebih besar dari pertumbuhan aktual,  $\gamma^* > \gamma$ , maka pertumbuhan disebut pro-poor, akan tetapi jika sebaliknya,  $\gamma^* < \gamma$ , maka pertumbuhan disebut anti-poor. Pada saat pertumbuhan negatif (resesi), di mana  $\gamma < 0$ , kemiskinan secara umum akan meningkat, namun jika ketimpangan berkurang sangat besar sehingga kemiskinan menurun, di mana  $\gamma^* > 0$ , maka kondisi resesi tersebut tergolong “*strongly pro-poor*”. Resesi disebut pro-poor jika  $\gamma < \gamma^* < 0$ , dan disebut anti-poor jika  $\gamma^* < \gamma < 0$ .

**C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Selama periode tahun 2015-2019 di Kabupaten Pekalongan, tingkat kemiskinan turun 3,1% dengan rata-rata sebesar 0,78% per tahun. Jumlah penduduk miskin juga berkurang dari sekitar 112 ribu orang pada tahun 2015, menjadi sekitar 87 ribu orang pada tahun 2019. Penurunan tingkat kemiskinan diiringi dengan penurunan indeks kedalaman kemiskinan sebesar 0,8% poin dan penurunan indeks keparahan kemiskinan sebesar 0,3% poin. Penurunan pada kedua indeks tersebut menunjukkan bahwa pada periode tahun 2015-2019, penurunan kemiskinan di Kabupaten Pekalongan diiringi dengan perbaikan kualitas ekonomi penduduk miskin.

Hasil estimasi ADePT menempatkan kelompok usia non produktif 0-14 tahun dan 60 tahun ke atas sebagai kelompok dengan tingkat kemiskinan terbesar serta memiliki share terbesar (42,7% - 50%) terhadap total penduduk miskin. Pada tahun 2019, lebih dari separuh rumah tangga miskin memiliki anggota rumah tangga sebanyak 5 orang atau lebih, dan hampir separuhnya (51,7%) memiliki 1 orang balita. Probability rumah tangga menjadi miskin dengan adanya perubahan demografi (kelahiran) meningkat hampir dua kali lipat dari 66,0% hingga 88,4% di tahun 2015 menjadi 119% hingga 135% di tahun 2019.

**Tabel 1.** Probabilitas Menjadi Miskin Karena Perubahan Tingkat Pendidikan Kepala Rumah Tangga di Kabupaten Pekalongan, Tahun 2015 dan 2019

<i>Education of the household head</i>	<b>2015</b>	<b>2019</b>
SD Ke bawah	(base)	(base)
SMP Sederajat	-26.5 s/d -38.0	-30.2 s/d -63.3
SMA Sederajat	-61.0 s/d -74.8	-65.2 s/d -78.9
Perguruan Tinggi	-95.4 s/d -96.7	-98.1 s/d -98.4

*Sumber: Output ADePT, diolah dari Susenas 2015 dan 2019*

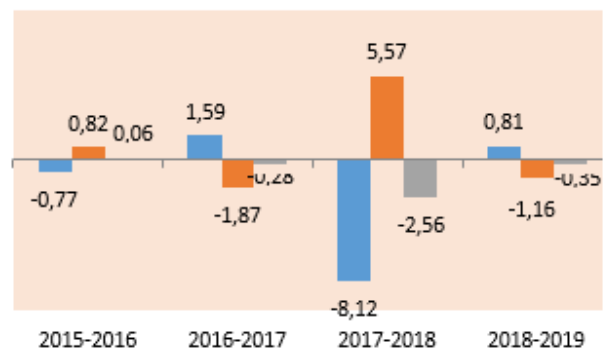
Penduduk miskin di Kabupaten Pekalongan didominasi mereka yang berpendidikan setingkat SD ke bawah (80,4% di tahun 2019). Besarnya peluang rumah tangga untuk terlepas dari kemiskinan semakin besar jika terjadi perubahan pendidikan kepala rumah tangga, terutama dari SD ke bawah menjadi SMP/ sederajat yang peluangnya bisa meningkat dua kali lipat pada tahun 2019 dibanding tahun 2015 sebagaimana ditunjukkan Tabel 1.

Ada kecenderungan terjadi pergeseran lapangan usaha penduduk miskin dari sektor manufaktur meskipun masih mendominasi ke sektor jasa. Penduduk miskin yang bekerja di sektor manufaktur

persentasenya menurun dari 26,6% (2015) menjadi 19% (2019), sementara penduduk miskin yang bekerja di sektor jasa justru meningkat hampir dua kali lipat dari 8,8% (2015) menjadi 15,9% (2019). Namun jika dilihat tingkat kemiskinan berdasarkan lapangan usaha, ada pergeseran dari sektor manufaktur ke sektor pertanian. Tingkat kemiskinan di sektor pertanian bergerak dari 8,8% (2015) menjadi 13,4% (2018) sementara tingkat kemiskinan di sektor manufaktur turun dari 15,2% (2015) menjadi 8,2% (2019). Gini ratio yang menggambarkan ketimpangan pendapatan mengalami fluktuasi sepanjang periode 2015- 2019, Sempat turun hingga 30,0 (2017) kemudian naik menjadi 33,8 (2018) dan kembali turun menjadi 30,6 (2019). Pertumbuhan rata-rata konsumsi per kapita sebesar 1% pada tahun 2019 dapat menurunkan tingkat kemiskinan 3,18% dari kondisi aktualnya, lebih kecil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jika terjadi inflasi sebesar 5%, tingkat kemiskinan akan meningkat menjadi 11,5% atau berubah 18,2% dari kondisi aktual. Sementara jika terjadi deflasi 5%, tingkat kemiskinan hanya akan turun 16% menjadi 8,2%. Simulasi ini menunjukkan bahwa penduduk rentan miskin jauh lebih banyak dibandingkan penduduk yang berada sedikit di bawah garis kemiskinan.

Hasil hitungan berdasarkan teknik dekomposisi Shapley (Gambar 1) di Kabupaten Pekalongan pada periode tahunan selama tahun 2015-2019 menunjukkan fakta adanya trade-off antara efek pertumbuhan dengan efek redistribusi dengan besaran yang hampir sama, akibatnya efek netto terhadap penurunan kemiskinan relatif kecil. Efek pertumbuhan bernilai negatif, yang berarti menurunkan kemiskinan, terjadi pada periode 2015-2016 dan 2017-2018. Pada periode 2016-2017 dan periode 2018-2019 justru efek redistribusi yang memberi efek menurunkan kemiskinan, sedangkan efek pertumbuhan justru berpotensi meningkatkan kemiskinan.

**Gambar 1.** Efek Pertumbuhan dan Efek Redistribusi, 2015-2019



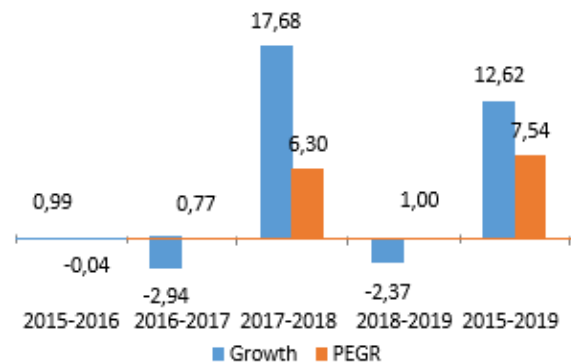
*Sumber: Output DASP, diolah dari Susenas 2015-2019*

Pertumbuhan konsumsi per kapita selama periode 2015-2019 secara proporsional selayaknya dapat menurunkan kemiskinan sebesar - 4,86% jika tidak terjadi perubahan distribusi pendapatan.

Efek redistribusi menunjukkan adanya ketimpangan yang berpotensi meningkatkan kemiskinan sebesar 1,36%. Akibatnya selama 5 tahun tingkat kemiskinan hanya turun sebesar -3,13%. Hal ini menunjukkan bahwa manfaat dari pertumbuhan ekonomi tidak terdistribusi secara baik, ketimpangan pendapatan yang terjadi menghambat laju penurunan tingkat kemiskinan. Pola pertumbuhan pada periode ini oleh Kakwani disebut sebagai “*trickle down*”, pembangunan memberikan efek menetas ke bawah yang lambat karena adanya ketimpangan. PEGR positif, namun masih jauh lebih rendah dari pertumbuhan riilnya. Perekonomian tumbuh 12,62%, sementara PEGR hanya sebesar 7,54%.

Pada periode 2015-2016 konsumsi per kapita masyarakat secara riil tumbuh 0,99%, namun kemiskinan justru meningkat ditandai dengan nilai negatif PEGR meskipun hanya sebesar -0,04%. Manfaat pertumbuhan ekonomi disinyalir hanya dinikmati oleh kelompok penduduk tidak miskin yang memicu terjadinya ketimpangan. Perekonomian tumbuh namun kemiskinan juga meningkat pola pertumbuhan seperti ini disebut oleh Bhagwati (1988) sebagai “*immiserizing growth*”. Pada periode 2016-2017 pola pertumbuhan berubah total menjadi “*strongly pro-poor*”. Secara rata-rata

pendapatan penduduk mengalami penurunan namun pendapatan sebagian penduduk miskin justru mengalami perbaikan. Pola pertumbuhan “*strongly pro-poor*” juga terjadi di periode 2018-2019.



**Gambar 2.** *Growth dan Poverty Equivalent Growth Rate (PEGR) Kabupaten Pekalongan, 2015-2019*

*Sumber: Susenas, diolah.*

Laju penurunan kemiskinan terbesar terjadi di periode 2017- 2018, dimana konsumsi per kapita dapat tumbuh secara riil hingga 17,68% meskipun tidak terdistribusi dengan baik, ditandai naiknya gini ratio dari 30,0 menjadi 33,8 yang menunjukkan adanya ketimpangan yang semakin melebar. Akibatnya manfaat dari pertumbuhan ekonomi yang dirasakan penduduk miskin secara proporsional masih lebih rendah dari penduduk non miskin. Pola pertumbuhan di periode ini masih bersifat “*trickle down*”.



#### **D. SIMPULAN DAN SARAN**

Pertumbuhan ekonomi merupakan syarat bagi upaya untuk menanggulangi kemiskinan. Namun demikian pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu beriringan dengan penurunan tingkat kemiskinan. Relasi antara pertumbuhan ekonomi dan perubahan tingkat kemiskinan bergantung pada kebijakan-kebijakan makro dan mikro yang pada gilirannya menentukan siapa yang menerima manfaat hasil pertumbuhan. Hasil analisis data Susenas 2015-2019 dengan metode dekomposisi *Shapley* menunjukkan adanya *trade-off* antara efek pertumbuhan dengan efek distribusi. Pertumbuhan cenderung disertai dengan ketimpangan yang menghambat efek penurunan kemiskinan. Hal ini menyebabkan dalam kurun 2015-2019, pertumbuhan di Kabupaten Pekalongan cenderung pada pola yang tidak *pro-poor* dan masih bersifat *trickle down*. Pola redistribusi mengarah pada kelompok non-miskin sehingga manfaat dari pertumbuhan ekonomi yang dirasakan oleh penduduk miskin secara proporsional lebih sedikit dibanding penduduk yang tidak miskin.

Melihat situasi tersebut agenda penting ke depan untuk penurunantingkat kemiskinan adalah meningkatkan kualitas pertumbuhan dengan menjadikan pertumbuhan lebih inklusif. Kunci upaya

tersebut paling tidak ada pada dua hal. Pertama penyediaan lapangan pekerjaan yang berkualitas. Ini dapat dilakukan dengan mendorong revitalisasi industri manufaktur diiringi dengan program-program padat karya—khususnya di perdesaan untuk mengisi periode di luar masa tanam dan panen. Kedua, menguatkan dan meningkatkan program-program perlindungan sosial bagi kelompok miskin dan rentan miskin. Program-program ini merupakan *safety net* bagi kelompok miskin dan rentan dalam menghadapi guncangan ekonomi, sekaligus upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dalam jangka panjang.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Araar, Abdelkrim dan Duclos, Jean- Yves. 2012. User Manual DASP Version 2.2. DASP: Distributive Analysis Stata Package. Université Laval. PEP. CIRPÉE dan World Bank.
- Badan Pusat Statistik, Beberapa Terbitan. Data dan Informasi Kemiskinan Buku 2: Kabupaten/kota, Jakarta.
- Bourguignon, F. 2004. The Poverty-Growth-Inequality Triangle. The World Bank, Washington, DC.
- Hajiji, Ajid. 2010. “Analisis Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Pendapatan,

- dan Kemiskinan di Propinsi Riau”. Tesis. IE-IPB, Bogor.
- Haughton, J dan Khandker, S.R. 2009. Pedoman Tentang Kemiskinan Dan Ketimpangan. Alih bahasa. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Kakwani, N dan Pernia, Ernesto M. 2000. “What is Pro Poor Growth?”. Asian Development Review;18(1).
- Kakwani, N dan Son, H.H. 2006. “Pro-poor Growth: The Asian Experience”. Research Paper. UNU-WIDER, No.2006/56, Brasilia.
- Kakwani, N dan Son, H.H. 2008. “Poverty Equivalent Growth Rate”. Review of Income and Wealth; 54:643-655.
- Laksani, C.S. 2010. Analisis Pro- Poor Growth Di Indonesia Melalui Identifikasi Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pendapatan dan Kemiskinan. [Tesis]. FE-UI, Jakarta.
- Lopez, J.H. 2011. “Pro-poor Growth: a review of what we know (and of what we don’t)”. The World Bank.
- Mar’atis, Atik. 2011. “Pro-Poor Growth Tingkat Provinsi Di Indonesia”. Tesis. IE-IPB, Bogor.
- Ravallion, M. dan S. Chen. 2001. “Measuring Pro-poor Growth”. Economic Letters;78(1):93-99.
- Son, H. H. 2007. “Interrelationship between Growth, Inequality, dan Poverty: The Asian Experience”. Asian Development Review, Vol. 24, No. 2, pp. 37-63.
- Suparno. 2010. “Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan Kemiskinan: Studi Pro Poor Growth Policy di Indonesia”. Tesis. IE-IPB, Bogor.
- Widodo, Tri. 2006. Perencanaan Pembangunan: Aplikasi Komputer (Era Otonomi Daerah). UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Wodon, Quentin. T. 1999. “Between Group Inequality and Targeted Transfers”. Policy Research Working Paper. The World Bank.